



EDISI KAMIS 05 FEB

2026

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Pe



02

GOVERNMENTTODAY
Tiba-tiba Pemerintah Setop BPJS PBI,
Ada Apa?

05

NUSANTARA
Tanah Bergerak Meluas di Tegal,
Ratusan Bangunan 'Hilang'

10

LISTSTYLE
Intip Ragam Pasmina yang Bakal
Jadi Tren Hijab Lebaran 2026

OTT BERTUBI-TUBI KPK BEA CUKAI DAN PAJAK LAGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam satu hari pada Rabu (4/2/2026). Ini menandai OTT kelima yang dilakukan lembaga antirasuah di tahun 2026. Operasi tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda di lingkungan Kementerian Keuangan. Pertama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Di lokasi tersebut KPK menangkap Mulyono, Kepala Kantor Pajak beserta sejumlah pegawai setempat terkait dugaan suap restitusi pajak. Penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar sebagai barang bukti. Lokasi kedua di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta. KPK menangkap beberapa pejabat, termasuk Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC yang kini menjabat Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, terkait dugaan korupsi proses impor. Dari situ, penyidik juga menyita uang tunai miliaran rupiah dan logam mulia seberat sekilogram sebagai barang bukti. Status hukum para pihak masih diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK. Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya menyatakan tidak akan meminta bantuan atau intervensi siapa pun, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dalam penanganan kasus OTT yang melibatkan anak buahnya. Ia menegaskan seluruh proses hukum harus berjalan independen dan transparan, serta meminta KPK mengusut perkara ini hingga tuntas tanpa pandang bulu. Menurut Purbaya, tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang diduga terlibat, dan penegakan hukum yang menyeluruh justru diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik serta membersihkan institusi dari praktik menyimpang. BACA HAL 11...



REKAP OTT KPK 2020-2026

2020 :

8 OTT (105 tersangka)

2021 :

6 OTT (113 tersangka)

2022 :

10 OTT (149 tersangka)

2023 :

7 OTT (161 tersangka)

2024 :

5 OTT (163 tersangka)

2025 :

11 OTT (116 tersangka)

2026 :

5 OTT *

(*Data tersangka
belum dirilis resmi)
(Data per 4 Feb)

DERETAN OTT KPK DI 2026

OTT KPK di KPP Banjarmasin (4 Februari 2026)

- Waktu: Rabu, 4 Februari 2026
- Lokasi: KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Instansi: DJP, Kementerian Keuangan
- Pihak Diamankan: Pegawai DJP (jumlah belum diumumkan)
- Dugaan Kasus: Penyalahgunaan kewenangan perpajakan
- Catatan: OTT pegawai pajak kedua KPK sepanjang 2026

OTT KPK di DJ Bea dan Cukai, Jakarta (4 Februari 2026)

- Waktu: Bersamaan dengan OTT Banjarmasin
- Lokasi: Jakarta, termasuk Kantor Pusat DJBC
- Instansi: DJ Bea dan Cukai, Kemenkeu
- Pihak Diperiksa: Pejabat DJBC (belum dirinci)
- Dugaan Kasus: Korupsi sektor kepareaan
- Catatan: Dua OTT KPK di lingkungan Kemenkeu dalam satu hari

Lanjutan ke hal 11...

TIBA-TIBA PEMERINTAH SETOP BPJS PBI, ADA APA?

Penonaktifan mendadak kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan membuka celah serius dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Di lapangan, kebijakan administratif itu berkelindan langsung dengan nyawa pasien, terutama mereka yang bergantung pada layanan medis rutin dan tak bisa ditunda. Ada apa?

Di Bekasi, seorang pasien gagal ginjal berinisial Lala (34)——namamadisamarkan——menghadapi situasi genting ketika status PBI BPJS Kesehatan miliknya tiba-tiba nonaktif. Padahal, selama tiga tahun terakhir, ia bergantung penuh pada program tersebut untuk menjalani hemodialisa dua kali sepekan.

Masalah itu baru diketahui Lala pada Senin malam, 2 Februari 2026, saat hendak kontrol di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih. Namanya tak lagi tercantum dalam basis data PBI melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Padahal, jadwal cuci darah berikutnya sudah menanti.

"Tiba-tiba per 1 Februari diputus. Besoknya jadwal HD. Sekarang saja sudah sesak napas. Kalau besok enggak ada HD, saya sudah enggak tahu lagi," kata Lala, Rabu (4/2/2026).

Hemodialisa bukan prosedur yang bisa ditunda. Ketika jadwal perawatan terancam batal, kondisi fisik Lala memburuk. Sesak napas kian terasa, sementara jalur administratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan justru berbelit.



Lala mendatangi Puskesmas Jatibening untuk mengurus reaktivasi, namun diarahkan ke Dinas Sosial Kota Bekasi. Di sana, ia diminta melengkapi sejumlah dokumen. Proses itu, menurutnya, tak mungkin rampung cepat, sementara tubuhnya tak bisa menunggu.

"Di puskesmas penuh orang-orang yang BPJS-nya juga mendadak tidak aktif. Jadi bukan cuma saya. Semua pada pusing dan capek," ujarnya.

Bela kangan terungkap,

kepesertaan Lala dinonaktifkan karena pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam pemutakhiran itu, ia tercatat masuk desil VI—kategori kelompok menengah ke atas—sehingga dinilai tak lagi memenuhi syarat sebagai penerima PBI, yang ditujukan bagi desil I hingga IV.

"Saya dimasukkan ke desil VI. Padahal kondisi ekonomi saya tidak berubah. Rumah bocor di atas, banjir di bawah," kata Lala.

REAKTIVASI BPJS KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)

Jika Nonaktif Kurang dari 6 Bulan

Peserta dapat langsung melakukan reaktivasi tanpa harus menunggu lama jika status nonaktifnya masih baru. Langkah-langkahnya:

Melalui Layanan Digital: Hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 atau melalui Chat Assistant JKN (CHIKA) untuk mengecek status dan panduan aktivasi.

Melalui Mobile JKN: Unduh aplikasi Mobile JKN, login, dan gunakan menu "Peserta" untuk mengecek serta mengikuti opsi aktivasi yang tersedia.

Datang Langsung: Kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau layanan kelling jika tersedia.

Jika Nonaktif Lebih dari 6 Bulan

Jika kartu sudah mati lebih dari 6 bulan, Anda harus melalui prosedur Dinas Sosial (Dinos) karena status kepesertaan biasanya terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lapor ke Dinas Sosial: Bawa KTP, KK, dan kartu PBI lama ke Dinas Sosial setempat untuk pengajuan pendaftaran kembali ke dalam DTKS.

Dapatkan Rekomendasi: Dinos akan memverifikasi kelayakan Anda dan mengeluarkan surat rekomendasi.

Aktivasi di BPJS: Bawa surat rekomendasi tersebut ke Kantor BPJS Kesehatan untuk pengaktifan kembali kartu.

Dokumen yang Diperlukan



Godok Rencana Pemutihan Tunggakan

PEMERINTAH terus mematangkan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan fokus pada pembenahan tata kelola dan mekanisme pelaksanaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan celah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara maupun sistem jaminan kesehatan nasional.

"Progresnya lagi penyempurnaan sistem tata kelolanya sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif. Tidak ada moral hazard, kesalahan, ataupun dinikmati oleh orang yang mau meraup keuntungan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammin Iskandar usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Muhammin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menjelaskan bahwa pematangan kebijakan masih terus berlangsung hingga saat ini. Pemerintah, kata dia, tidak ingin pemutihan tunggakan justru dimanfaatkan oleh peserta yang sebenarnya mampu membayar iuran, atau oleh pihak-pihak yang mencoba

mengambil keuntungan dari kebijakan afirmatif tersebut.

Menurut Cak Imin, kehati-hatian pemerintah didasari oleh pengalaman sebelumnya, di mana kebijakan keringanan iuran kerap menimbulkan risiko moral hazard jika tidak disertai basis data yang akurat dan pengawasan yang ketat. Karena itu, penyempurnaan tata kelola menjadi prasyarat sebelum kebijakan dijalankan secara luas.

Ia juga mengakui bahwa target penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang semula direncanakan rampung pada akhir 2025 mengalami penyesuaian waktu. Pemerintah menilai perlu tambahan waktu untuk memastikan kesiapan sistem, termasuk validasi data penerima manfaat.

"Ya awal tahun ini ya," ujarnya. Meski demikian, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan tersebut dengan prinsip kehati-hatian agar benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Terkait kebutuhan anggaran, Cak Imin menyebut pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan perhitungan lanjutan. Pada akhir

2025, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp20 triliun untuk mendukung rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Namun, realisasi anggaran tersebut akan sangat bergantung pada hasil verifikasi data dan cakupan peserta yang memenuhi kriteria.

Pemutihan tunggakan iuran ini direncanakan tidak bersifat umum. Kebijakan tersebut hanya diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan kriteria tertentu, khususnya peserta mandiri yang mengalami perubahan kondisi sosial-ekonomi dan kemudian beralih status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan ditujukan bagi peserta yang masih memiliki kewajiban iuran meskipun status kepesertainya telah berubah. Menurutnya, dalam praktik di lapangan, banyak peserta mandiri yang menunggak iuran sebelum akhirnya masuk dalam skema PBI.

"Pemutihan itu untuk orang yang sudah pindah komponen, dulunya mandiri, dia sudah pindah ke PBI, tunggakan itu dihapus," kata Ghufron. (gus,ist,kim/dya)

Ia juga disebut memiliki penghasilan tetap dan kendaraan pribadi. Namun menurut Lala, pendapatannya jauh dari cukup untuk membayar cuci darah secara mandiri. Kendaraan yang dimilikinya pun hanya sepeda motor bebek lama.

Upaya mencari alternatif layanan di rumah sakit pemerintah juga menemui jalan buntu.

Permitaangan agar bisa "menumpang" hemodialisa sementara waktu ditolak karena status kepesertaan tak aktif.

Kasus serupa muncul di Depok. Seorang warga berinisial A (38) terpaksa pulang dari rumah sakit meski dokter menyarankan rawat inap. Penyebabnya sama: BPJS PBI yang dinonaktifkan. A mengalami sakit asam lambung akut, dengan indikasi luka di hati, serta memiliki riwayat kanker payudara dan operasi pengangkatan rahim.

"Dua hari lalu balik lagi ke rumah sakit dan disuruh dirawat, tapi pas dicek ternyata BPJS-nya mati. Ya akhirnya pulang, tidak jadi dirawat," kata Nurhasanah, saudara A.

A kini hanya mendapat perawatan infus di rumah sambil menunggu pengurusan ulang status BPJS di tingkat kelurahan. (wid,ktn/dya)

Tragedi Anak SD di NTT

DPR SERUKAN EVALUASI BANTUAN PENDIDIKAN

Peristiwa bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, membuka kembali perdebatan soal efektivitas bantuan pendidikan dan kehadiran negara dalam melindungi anak dari keluarga rentan. Sejumlah anggota DPR menilai kasus ini bukan sekadar tragedi individual, melainkan peringatan keras atas celah struktural dalam sistem pendidikan dan perlindungan sosial.

Korban, siswa kelas IV berusia 10 tahun, diduga mengakhiri hidupnya setelah tekanan psikologis akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Informasi yang beredar menyebutkan, bocah tersebut sempat meminta buku dan pulpen, namun keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratkomo menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang mengguncang nurani publik. Menurut dia, seorang anak usia sekolah dasar seharusnya berada dalam fase tumbuh dengan rasa aman dan harapan, bukan terjebak dalam beban psikologis akibat kebutuhan pendidikan paling mendasar.

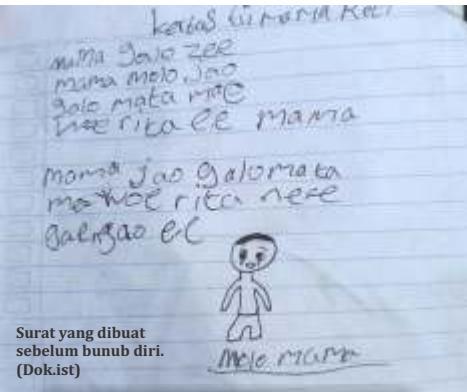
"Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat menyentuh nurani. Seorang anak usia sekolah dasar seharusnya berada dalam fase tumbuh



dengan rasa aman, harapan, dan semangat belajar. Ketika kebutuhan pendidikan paling dasar saja menjadi beban psikologis, maka yang gagal bukan hanya keluarga, tetapi sistem sosial dan negara," kata Singgih, Rabu (4/2/2026).

Ia menilai kasus ini menunjukkan

masih lebarnya kesenjangan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak. Singgih menegaskan pendidikan dasar seharusnya benar-benar gratis dan membebaskan anak dari rasa takut, malu, dan tekanan. Jika alat tulis masih menjadi beban keluarga miskin, ia menilai perlu



FAKTA-FAKTA TERKAIT PERISTIWA TERSEBUT

- **Penyebab Utama:**
Korban putus asa karena permintaan buku tulis dan pulpen tidak terpenuhi akibat kondisi ekonomi keluarga. Nilai alat tulis kurang dari Rp10.000.
- **Waktu dan Lokasi:**
Korban ditemukan meninggal tergantung di pohon cengkeh, Kamis 29 Januari 2026, di Desa Nenawea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada.
- **Pesan Terakhir:**
Korban meninggalkan surat tulisan tangan untuk ibunya sebelum kejadian.
- **Kondisi Ekonomi Keluarga:**
Keluarga hidup dalam kemiskinan ekstrem, tinggal di pondok bambu. Korban siswa kelas IV SD dengan semangat sekolah tinggi.
- **Respons Pemerintah:**
 - Gubernur NTT menyebut kasus ini sebagai kegagalan daerah dan alarm pemutakhiran data kemiskinan ekstrem.
 - Menteri Sosial menekankan penguatan pendampingan keluarga prasejahtera.
 - Polda NTT menurunkan tim psikolog dan konselor untuk pendampingan keluarga korban.

Alarm Keras! Akademisi Sebut Kehadiran Negara Dipertanyakan

TRAGEDI kemanusiaan yang menimpa YBS (10), siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya menggugah rasa duka. Bagi pengamat politik Rocky Gerung, peristiwa itu adalah alarm keras bagi keadilan sosial dan kehadiran negara di tengah realitas kehidupan warga kecil.

Kasus itu bermula ketika YBS, yang tinggal bersama neneknya di sebuah pondok sederhana, meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pena, kebutuhan sekolah yang dianggap biasa oleh banyak kalangan. Permintaan itu tidak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Beberapa hari kemudian, bocah itu ditemukan tewas setelah diduga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

Rocky Gerung menyikapi peristiwa ini sebagai manifestasi kegagalan struktur sosial dan politik dalam memastikan hak dasar anak-anak terpenuhi. Ia menilai tindakan YBS, meskipun tragis, mencerminkan pilihan ekstrem yang lahir dari

konteks sosiopolitik yang tidak berpihak terhadap kelompok rentan.

"Saya tadi baca berita di NTT, anda tahu berita itu, anak umur 10 tahun memilih bunuh diri... Untuk menyelamatkan hidup di dunia, dia minta dibelikan buku, ibunya bilang tidak ada uang, lalu dia memilih bunuh diri, satu tindakan Republikanisme," kata Rocky saat berbicara di hadapan mahasiswa, Rabu (4/2/2026).

Dia juga menyayangkan kontras antara kebutuhan dasar yang tak terpenuhi dengan prioritas besar dalam anggaran negara. Menurut Rocky, peristiwa ini menunjukkan ada yang fundamental tidak beres dalam urusan republik ketika seorang anak merasa harus memilih mati demi meringankan beban ibunya.

"Yang kalau kita bongkar, anak 10 tahun bisa memilih bunuh diri dan menulis surat pada ibunya... supaya publik mengerti bahwa ada yang tidak beres dengan urusan republik. God of small things," ujar Rocky, mengaitkan tragedi itu dengan gambaran besar politik ekonomi

negara.

Sementara, Prof. Bagong Suyanto, Pengamat Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga, menilai kemiskinan ekstrem menjadi salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap munculnya keinginan bunuh diri, terutama di kalangan anak-anak yang paling rentan.

"Tekanan kemiskinan memang menjadi kondisi yang memengaruhi," kata Prof. Bagong. Ia mengingatkan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada kemampuan ekonomi, tetapi juga pada psikologi dan kesejahteraan sosial anak-anak yang hidup di lingkungan miskin.

Menurut Bagong, negara perlu menghadirkan pendekatan yang lebih luas dalam melindungi anak, termasuk membangun sistem dukungan komunitas (community support system) yang melibatkan masyarakat untuk ikut memantau dan mendampingi anak-anak yang rentan terhadap tekanan sosial maupun psikologis.(wid,rls,ist/dya)

evaluasi menyeluruh atas bantuan pendidikan yang selama ini digulirkan pemerintah.

"Jika alat tulis masih menjadi beban keluarga miskin, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas bantuan pendidikan yang selama ini digulirkan," ujarnya.

Selain soal ekonomi, Singgih menyoroti lemahnya deteksi dini terhadap kondisi psikososial anak. Ia menyebut anak kerap memandang tekanan karena takut dimarahi atau dianggap merepotkan orang tua. Menurut dia, sekolah dan guru seharusnya memiliki kepekaan lebih terhadap kondisi mental siswa. (gus,kcm,ist/dya)

BERTAHAN DI LEVEL PSIKOLOGIS, DEMUTUALISASI BEI MENUNGGU PAYUNG HUKUM

Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki tahap krusial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan langkah perubahan status bursa dari lembaga milik anggota menjadi perseroan terbuka tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum operasional. Hingga kini, kerangka regulasinya masih berada pada level Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang difinalisasi pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan mandat demutualisasi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini tengah merampungkan aturan pelaksanaannya.

“Demutualisasi kemarin kami terinfo sedang dalam perumusan peraturan pelaksanaan, jadi mandatnya sudah ada kan di undang-undang P2SK, nah sekarang sedang dilakukan perumusan finalisasi untuk

RPP-nya, peraturan pemerintah di Kementerian Keuangan,” ujar Hasan saat ditemui di gedung BEI, Rabu (4/2/2026).

OJK, menurut Hasan, terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian beleid tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan waktu penerbitan PP demutualisasi. Setelah PP diundangkan, OJK dan BEI akan langsung menyusun regulasi turunan, baik di tingkat otoritas maupun peraturan internal bursa.

“Tentu setelah itu, jadi nanti pada saat PP diundangkan misalnya,

melalui penerbitan PP dimaksud, kami akan melakukan itu berbarengan dengan tentu kami akan melihat sejauh mana dampak atau kebutuhan penyempurnaan atau penyusuan di tingkat peraturan selanjutnya, yaitu peraturan di OJK,” kata Hasan.

Ia menambahkan, penyesuaian regulasi juga akan dilakukan pada level teknis pelaksanaan, termasuk peraturan bursa, untuk memastikan transisi demutualisasi berjalan tanpa mengganggu stabilitas pasar.

Di sisi lain, OJK menyatakan terbuka terhadap masuknya investor sebagai pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi rampung. Sikap ini merespons sinyal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berminat menjadi



Dittipideksus Bareskrim Polri mingeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di Jakarta, Selasa (3/2/2026). (dok. Dittipideksus Bareskrim Polri)

Kasus Saham Gorengan Mulai Tetapkan Tersangka

PENANGANAN dugaan praktik saham gorengan di pasar modal Indonesia menunjukkan percepatan. Aparat penegak hukum telah menetapkan tersangka dan memperluas penyidikan terhadap sejumlah kasus, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan dukungan penuh dalam bentuk koordinasi data dan kerja sama sesuai kewenangan untuk mendukung proses hukum.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah menangani beberapa perkara dugaan manipulasi harga saham yang masuk kategori praktik saham gorengan. Penyidik telah menetapkan tersangka dari berbagai kasus, termasuk

yang melibatkan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Narada Asset Manajemen. Dalam kasus PIPA, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri atas eks staf Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pihak dari PT MML terkait proses penawaran umum perdana (IPO).

Dalam pengembangan perkara lain, Bareskrim menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan insider trading dan perdagangan semu di PT Narada Asset Manajemen. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa transaksi yang diduga dirancang untuk menciptakan harga semu di pasar merupakan bagian dari modus yang diperiksa penyidik.

Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Senayan. Penggeledahan tersebut, menurut Ade Safri, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan proses IPO saham PIPA, dan merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang lebih luas terhadap praktik pasar yang merusak harga wajar efek.

OJK menyatakan menghormati dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa institusinya siap menyediakan segala kebutuhan data atau informasi yang diperlukan untuk memperlancar proses penyidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Setiap kebutuhan kelengkapan data maupun penyediaan informasi yang diperlukan untuk memperlancar proses hukum ini akan kami penuhi dan sediakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Hasan juga menegaskan bahwa koordinasi antara OJK dan aparat penegak hukum termasuk bagian penting dalam menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia. Keberadaan kerja sama lintas lembaga ini dipandang krusial agar langkah penindakan berjalan akuntabel dan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor. (wid,ist/dya)

PERGERAKAN IHSG

Ringkasan Performa
(26 Jan 2026 - 4 Feb 2026)

○ Pembukaan:	8.121,03
○ Penutupan Sebelumnya	8.122,60
○ Tertinggi	8.194,68
○ Terendah	8.050,40
○ Tertinggi 52 Minggu	9.174,47
○ Terendah 52 Minggu	5.882,60

Riwayat Harian

○ 4 Feb 2026	Penutupan 8.146,72 (+0,30%)
○ 3 Feb 2026	Penutupan 8.122,60 (+2,52%)
○ 2 Feb 2026	Penutupan 7.922,73 (-4,88%)
○ 30 Jan 2026	Penutupan 8.329,61 (+1,18%)

pemegang saham bursa.

Eks Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menegaskan keterbukaan tersebut tetap disertai kajian menyeluruh. OJK akan mempertimbangkan aspek stabilitas pasar, kepentingan jangka panjang, serta independensi dan tata kelola BEI agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

“Tentunya ini semuanya akan kita kaji ya secara kondusif gitu ya, proporsional bahwasannya kita akan welcome kepada siapapun pemegang saham ya. Jadi kita tentunya akan welcome kepada itu sesuai dengan undang-undang,” ujar Inarno dalam konferensi pers di gedung BEI, Jumat, 30 Januari 2026.

Sementara proses regulasi demutualisasi berjalan, pasar saham domestik menunjukkan pergerakan relatif stabil. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Rabu, 4 Februari 2026, bertahan di level psikologis 8.000 dan ditutup menguat 0,30 persen atau naik 24,119 poin ke posisi 8.146.

Berdasarkan data RTI, IHSG sempat dibuka di level 8.121, bergerak pada kisaran terendah 8.050 dan tertinggi 8.194. Total volume transaksi mencapai 45,431 miliar saham dengan nilai Rp25,745 triliun. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp14.735 triliun, dengan frekuensi transaksi mencapai 2.890.404 kali. Sebanyak 301 saham menguat, 391 melemah, dan 125 stagnan. (tin,ktn,ist/dya)

TANAH BERGERAK MELUAS DI TEGAL, RATUSAN BANGUNAN 'HILANG'

Pergerakan tanah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terus meluas dan berdampak pada ratusan rumah warga. Hingga Rabu (4/2/2026), bencana tersebut memaksa ratusan warga mengungsi, merusak permukiman, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, hingga infrastruktur desa. Data sementara menunjukkan sekitar 250 rumah warga dilaporkan hilang atau tidak lagi memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan penanganan tidak akan berhenti pada fase tanggap darurat.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan percepatan relokasi warga terdampak sekaligus penyiapan hunian tetap sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang pasca bencana. Instruksi itu disampaikan dalam rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Rabu siang.

"Penanganan bencana tidak boleh berhenti di tanggap darurat. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Menurut Luthfi, pemenuhan kebutuhan warga terdampak tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah daerah dan provinsi diminta menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap secara terencana dan berkelanjutan. "Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan hunta dan huntp harus di-backup," ujarnya.

Ia menegaskan, tanggung jawab negara tidak hanya memastikan keselamatan warga, tetapi juga menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar selama masa pemulihan. "Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai



Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten Tegal memicu bencana tanah bergerak di Dukuh Tigasari, Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara pada Selasa (3/2/2026) sore. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan.(ant)

dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya," kata Luthfi.

Selain aspek kemanusiaan, Gubernur meminta percepatan penanganan infrastruktur terdampak. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah diminta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menangani jalan dan jembatan yang rusak. "Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan putus, satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani," ujar Luthfi.

Ia juga meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan secara rinci dan berkelanjutan. "Harus mulai didata. Jangan ditinggal. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah kelelahan," katanya.

Data sementara menunjukkan sekitar 250 rumah warga dilaporkan hilang atau tidak lagi memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula. Kondisi itu, menurut Luthfi, harus menjadi prioritas pemulihan sosial jangka panjang. "Ini harus jadi perhatian serius. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya," ujarnya.

Luthfi menekankan, hunian sementara harus diproyeksikan sebagai tahap menuju hunian tetap, bukan sekadar lokasi pengungsian. "Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap," katanya.

Terkait pembangunan hunian tetap, ia meminta pemerintah daerah

segera menyiapkan lokasi relokasi dengan dasar hukum yang jelas.

"Pemda siapkan lokasi dengan legalitas yang kuat. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok," ujar Luthfi.

Dalam proses relokasi, aspek sosial diminta menjadi perhatian utama agar warga dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru. "Hadirlah negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara," katanya.(tin,dtc,new/dya)

Peringatan Dini Hujan 6 Februari 2026

Waspada (Hujan Sedang - Lebat)

- Aceh
- Banten
- Bali
- Bengkulu
- D.I Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Jambi
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kep. Bangka Belitung
- Maluku Utara
- Lampung
- Maluku Utara
- Lampung
- Maluku Utara
- NTT
- Papua
- Papua Barat
- Papua Barat Daya
- Papua Pegunungan
- Papua Tengah
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara

Siaga (Hujan Lebat - Sangat Lebat)

- Nusa Tenggara Barat
- Papua Selatan
- Sulawesi Selatan

Peringatan Dini Angin Kencang

- Sulawesi Selatan

Sumber: BMKG

BMKG Deteksi 3 Bikit Siklon, Waspada Hujan Deras dan Gelombang Tinggi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat keberadaan tiga bikit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang secara bersamaan memengaruhi dinamika atmosfer regional. Ketiga sistem tersebut memicu perlambatan dan belokan angin, membentuk daerah konvergensi, serta meningkatkan potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan.

Bikit siklon tropis yang terpantau adalah 94W, 92S, dan 98P. Prakirawati cuaca BMKG Yuyun Wulandari mengatakan, ketiga bikit siklon tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan awan hujan dan berpotensi memicu hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah daerah.

"Keberadaan bikit siklon ini menginduksi belokan dan perlambatan angin yang membentuk daerah konvergensi dan meningkatkan potensi cuaca signifikan," kata Yuyun dalam siaran daring BMKG yang diikuti di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Bikit siklon tropis 94W terpantau berada di Samudera Pasifik utara Papua dengan tekanan udara sekitar 1.005 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin berkisar 20-25 knot.

Menurut Yuyun, bikit siklon 94W memengaruhi kondisi atmosfer di perairan utara Papua. Meski demikian, berdasarkan analisis BMKG, potensi sistem ini untuk berkembang menjadi

siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih tergolong rendah.

Namun, dalam keterangan terpisah yang dirilis BMKG dan dikutip kumparan, bikit siklon 94W disebut memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis. BMKG menyatakan sistem tersebut berada di wilayah pemantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta dan diprakirakan bergerak ke arah barat dalam 24 jam ke depan.

"Saat ini, posisi bikit tersebut berada di Samudera Pasifik utara Papua. Bikit Siklon Tropis 94W memiliki peluang Tinggi untuk menjadi siklon tropis," kata BMKG.

Dampak tidak langsung dari bikit

siklon 94W diperkirakan meliputi hujan dengan intensitas sedang di Maluku Utara, serta gelombang laut setinggi 1,25-2,5 meter di Samudera Pasifik utara Papua Barat hingga Papua dan perairan Kepulauan Sangihe. Gelombang laut lebih tinggi, mencapai 2,5-4 meter, berpotensi terjadi di Kepulauan Talaud serta Samudera Pasifik utara Maluku hingga Papua Barat Daya.

BMKG mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, dan operator pelayaran di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan kondisi perairan yang berbahaya. (tin,bmkg,rls/dya)

Lowokwaru Episentrum Persoalan Urban Kota Malang, DPRD: Konflik Sosial hingga Drainase



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya pada Musrenbang Kecamatan Lowokwaru, Rabu (4/2/2026). (Santi/Lentera)

MALANG - Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, sebut Kecamatan Lowokwaru sebagai episentrum persoalan urban di Kota Malang. Dalam Musrenbang Kecamatan Lowokwaru, ia menyoroti 5 masalah prioritas yang harus segera

(Musrenbang) menjadi momentum penting untuk melihat perbedaan kebutuhan antar kecamatan di Kota Malang. Sebab, menurutnya, persoalan yang dihadapi setiap wilayah tidak bisa disamaratakan.

dituntaskan.

"Permasalahan perkotaan atau permasalahan urban, itu ada di Lowokwaru. Seperti yang disampaikan Pak Wali juga, kita punya banyak kampus di kecamatan Lowokwaru, pendatang juga banyak, dan lain sebagainya sehingga permasalahan perkotaan banyak di sini," ujar Amithya, Rabu (4/2/2026).

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menilai forum musyawarah rencana pembangunan

"Saat ini di Lowokwaru menurut saya ada lima permasalahan yang harapannya bisa terselesaikan," tegasnya.

Kelima persoalan prioritas tersebut, lanjut Mia, meliputi konflik sosial, persoalan drainase, penanganan lingkungan dan persampahan, penguatan UMKM atau ekonomi lokal, serta persoalan parkir dan lalu lintas.

Mia berharap, pada Musrenbang tingkat kota nanti, usulan dari Kecamatan Lowokwaru dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat, mengingat karakter tiap kecamatan di Kota Malang berbeda.

"Yang jelas lima hal ini harus menjadi perhatian kita. Pemkot harus punya program kebijakan yang mengena di masing-masing kebutuhan itu," tambahnya.

Senada dengan Mia, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui dinamika di Lowokwaru merupakan yang paling tinggi dibanding kecamatan lain di Kota Malang.

"Mulai dari permasalahan kepadatan penduduknya, jumlah

perguruan tinggi yang ada, dan lain sebagainya. Jadi memang yang harus banyak kita perhatikan di Lowokwaru," jelas Wahyu.

Menurutnya, persoalan yang paling menonjol adalah dinamika penduduk. Pasalnya, diketahui beberapa kasus seperti tawuran antar pendatang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Namun demikian, Pemkot Malang, kata Wahyu, telah melakukan pendekatan sosial melalui moderasi. Serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat lintas suku dan komunitas yang ada di Lowokwaru.

"Untuk mengatasi itu kami melibatkan moderasi, ada perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok antar suku dan lain-lain. Itu ada pendekatan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan," katanya.

Wahyu juga menegaskan, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan harus benar-benar menampung usulan prioritas masyarakat yang nantinya dapat direalisasikan dalam program pembangunan.(Santi/Dya)

Awal Tahun, Realisasi Pajak Hotel-Hiburan Mendominasi di Kabupaten Malang

MALANG - Sektor perhotelan, kuliner, hingga hiburan mendominasi realisasi pajak daerah Kabupaten Malang di awal tahun 2026. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan, ketiga sektor tersebut menjadi kelompok pajak dengan persentase capaian tertinggi dibanding jenis pajak lainnya hingga awal Februari.

"Dari 12 jenis pajak yang dikelola, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan mencatat capaian tertinggi secara persentase, yakni 13,03 persen dari target Rp8.276.724.151," ujar Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara, Rabu (4/2/2026).

Made menjelaskan, dari persentase 13,03 persen tersebut, realisasi PBJT perhotelan setara dengan angka Rp1.078.222.452. Kemudian disusul PBJT makanan dan/atau minuman (kuliner) sebesar Rp2.248.925.014 atau 10,91 persen dari target Rp20.607.393.102.

Disebutkannya, berdasarkan laporan per Senin (2/2/2026), total

realisasi 12 jenis pajak daerah telah mencapai Rp48.334.619.795 atau 6,40 persen dari target tahunan sebesar Rp754.677.666.534.

Lebih lanjut, selain pajak perhotelan dan kuliner, Made menyebut PBJT jasa kesenian dan hiburan juga menunjukkan angka signifikan, dengan realisasi Rp923.715.422 atau 11,35 persen dari target Rp8.138.978.570. "Ketiga sektor ini menjadi kelompok pajak dengan capaian dua digit di awal tahun," katanya.

Menurut Made, tingginya capaian di sektor tersebut tidak lepas dari aktivitas masyarakat yang mulai bergerak di bidang konsumsi jasa, kuliner, serta hiburan. "Hal ini terbaca jelas dari komposisi realisasi pajak yang masuk dalam bulan pertama tahun anggaran ini," imbuhan Made.

Sementara itu, PBJT tenaga listrik tercatat sebesar Rp12.824.697.864 atau 8,84 persen dari target Rp145.069.081.540. Angka ini juga

dinilai mencerminkan aktivitas rumah tangga maupun usaha yang tetap berjalan stabil di awal tahun.

Adapun pajak lainnya seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi Rp78.356.525 atau 9,00 persen dari target Rp870.825.412, pajak air tanah Rp671.445.641 atau setara dengan 9,37 persen dari target Rp7.164.445.439, serta PBJT jasa parkir Rp109.335.131 atau 6,88 persen dari target Rp1.588.295.198.

Di sisi lain, jenis pajak yang umumnya memiliki pola tahunan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru terealisasi Rp1.945.867.448 atau 1,55 persen dari target Rp125.556.388.953.



Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara. (Santi/Lentera)

Pajak reklame juga masih berada di angka Rp171.941.008 atau 3,35 persen dari target Rp5.126.462.764. Sementara itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat Rp9.998.868.140 atau 4,94 persen dari target Rp202.576.054.105. (Santi/Dya)

SAAT MUSIM DINGIN MENGGILA, RUSIA GEMPUR PEMBANGKIT LISTRIK UKRAINA

Rusia meningkatkan intensitas serangan militer ke sejumlah wilayah Ukraina seiring datangnya musim dingin. Serangan dilakukan melalui kombinasi rudal jarak jauh, drone, dan artileri, dengan sasaran utama infrastruktur energi, fasilitas militer, serta kawasan perkotaan strategis. Ada sedikitnya 450 drone dan 70 rudal yang dikerahkan Kremlin.

Dalam operasi ini, Kremlin mengerahkan ratusan drone dan puluhan rudal jarak jauh. Serangan berlangsung pada Selasa dini hari, 3 Februari 2026, dan disebut sebagai salah satu operasi udara terbesar sejak invasi Rusia ke Ukraina hampir empat tahun lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia melepaskan sekitar 450 drone dan 70 rudal dalam satu malam.

Serangan terjadi menjelang pertemuan delegasi Rusia dan Ukraina dalam perundingan damai yang dimediasi Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Waktu serangan itu dinilai mempertegas sikap Moskwa yang tetap mengandalkan tekanan militer di tengah jalur diplomasi yang masih rapuh.

Sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kyiv, Kharkiv, dan Odesa. Otoritas Ukraina melaporkan jaringan listrik kembali menjadi target utama.



Pemadaman listrik terjadi wilayah kota Belgorod, Rusia, pada Selasa (3/2/2026), imbas serangan Ukraina yang menargetkan lokasi pembangkit listrik di lokasi tersebut.(ist.rtr)

Upaya ini dinilai bertujuan memutus pasokan listrik, pemanas, dan air bersih bagi warga sipil saat suhu berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan energi swasta terbesar Ukraina, DTEK, mengonfirmasi fasilitas pembangkit listrik mereka kembali diserang. Ini merupakan serangan besar kesembilan terhadap aset

Trump Minta Rusia Hentikan Perang



Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin tiba untuk konferensi pers di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson pada 15 Agustus 2025, di Anchorage, Alaska. (Getty)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump kembali mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang di Ukraina yang hampir memasuki tahun keempat. Desakan tersebut disampaikan di tengah eskalasi baru serangan Rusia ke Ukraina, termasuk terhadap infrastruktur energi, yang dinilai menguji efektivitas tekanan diplomatik Washington.

"Saya ingin dia mengakhiri perang," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih dikutip Rabu (4/2/2026) menanggapi serangan terbaru Rusia ke Kyiv dan sejumlah wilayah lain.

Ketika ditanya apakah ia kecewa karena Rusia tidak memperpanjang penghentian serangan sementara, Trump menjawab, "Saya ingin dia melakukaninya."

Trump menyebut Rusia sempat menghentikan serangan selama sekitar satu pekan, dari Minggu hingga Minggu berikutnya, menyusul permintaannya kepada Putin dengan alasan cuaca musim dingin ekstrem. "Itu banyak, Anda tahu, satu minggu. Kami akan menerima apa pun, karena di sana benar-benar sangat dingin," ujar Trump. Ia menilai Putin telah "menepati janjinya" selama periode jeda tersebut.

Namun, jeda singkat itu berakhir dengan serangan berskala besar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan Rusia melancarkan serangan terbesar tahun ini terhadap infrastruktur energi Ukraina, menggunakan puluhan rudal dan ratusan drone, tepat ketika suhu musim dingin berada pada titik terendah.

"Tentara Rusia memanfaatkan usulan AS untuk menghentikan

serangan bukan untuk mendukung diplomasi, melainkan untuk menimbun rudal dan menunggu hingga hari-hari terdingin dalam setahun datang," kata Zelenskiy dalam ungkapannya.

Zelenskiy mengatakan serangan tersebut akan berdampak pada posisi tim negosiasi Ukraina dalam perundingan damai yang kembali digelar pekan ini. "Tim negosiasi kami akan disesuaikan sesuai dengan situasi," ujarnya.

Serangan tersebut mengakhiri moratorium singkat atas serangan terhadap infrastruktur energi yang diminta Trump menjelang pembicaraan trilateral antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat. Sebagai bagian dari kesepakatan sementara itu, Ukraina sebelumnya menyatakan akan menahan diri dari serangan rutin terhadap kilang minyak dan fasilitas energi Rusia.

"Memanfaatkan hari-hari terdingin musim dingin untuk meneror orang lebih penting bagi Rusia daripada beralih ke diplomasi," kata Zelenskiy dalam pernyataan terpisah. "Tanpa tekanan pada Rusia, perang ini tidak akan pernah berakhir." (gus,rtr,ist/dya)

perusahaan tersebut sejak Oktober 2025. Di ibu kota Kyiv, serangan juga merusak bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, serta fasilitas umum lainnya. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut.

Serangan besar-besaran ini berlangsung di tengah upaya pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencari terobosan perdamaian. Meski pembicaraan awal antara kedua pihak sebelumnya disebut cukup konstruktif, prospek kesepakatan damai masih jauh, terutama karena tuntutan Rusia atas wilayah-wilayah Ukraina yang saat ini didudukinya.

Sepanjang perang, Rusia secara konsisten menargetkan infrastruktur listrik Ukraina sebagai bagian dari strategi melemahkan moral warga sipil dan meningkatkan tekanan politik terhadap Kyiv. Musim dingin kembali menjadi medan tambahan dalam konflik yang belum menunjukkan tanda akan mereda.

Gempuran terjadi bertepatan dengan kedatangan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Kyiv untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan ini juga berlangsung menjelang pembicaraan damai tiga pihak yang dijadwalkan digelar di Uni Emirat Arab dalam pekan yang sama.

Presiden Zelensky mengatakan Moskwa meluncurkan sekitar 450 drone jarak jauh dan 70 rudal dalam satu malam. Sasaran utama serangan diarahkan ke jaringan listrik nasional Ukraina. Zelensky menuduh Rusia sengaja memanfaatkan suhu ekstrem musim dingin untuk meningkatkan tekanan terhadap warga sipil.

"Mengambil keuntungan dari hari-hari terdingin di musim dingin untuk meneror orang-orang jauh lebih penting bagi Rusia daripada diplomasi," ujar Zelensky.

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menyatakan serangan tersebut telah dipersiapkan jauh hari. Ia menuduh Rusia menunggu suhu turun sembari menimbun persenjataan untuk kembali menggempur Ukraina. Menurut Sybiha, strategi ini menunjukkan kelanjutan pola kekerasan yang menargetkan warga sipil.

Angkatan Udara Ukraina merinci Rusia meluncurkan berbagai jenis senjata, termasuk rudal anti-kapal Zircon dan Onix, rudal balistik Iskander-M serta S-300, hingga rudal jelajah Kh-22 dan Kh-101. Sistem pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat sebagian besar serangan, namun puluhan rudal dan drone tetap menghantam puluhan lokasi dan melukai sedikitnya 10 orang.

Sementara itu, pakar dari Global Rights Compliance, Rebecca Bakos Blumenthal, menilai serangan ini menunjukkan tidak adanya perubahan dalam strategi militer Rusia meskipun proses diplomasi tengah berjalan. Menurutnya, serangan sistematis terhadap infrastruktur energi dan sipil telah menjadi inti strategi Rusia selama musim dingin. (wid,ist,ana/dya)

GAYA HIDUP SEHAT AGAR TERHINDAR DARI OBESITAS

Indonesia sedang mengalami transisi Epidemiologi, yaitu pergeseran dari dominasi penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) sebagai penyebab utama kematian dan kecacatan. Sekitar 80% PTM dipicu oleh gaya hidup tidak sehat, seperti kurang aktivitas fisik,

rendahnya konsumsi sayur dan buah, tingginya asupan gula, garam, dan lemak, kebiasaan merokok, serta konsumsi alkohol. Kondisi ini membuat PTM sebenarnya dapat dicegah.

Salah satu dampak gaya hidup tidak sehat adalah obesitas, yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit serius seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara kalori yang masuk dan yang dikeluarkan tubuh.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya memerlukan pengaturan pola makan seimbang serta aktivitas fisik secara rutin.

Untuk menekan angka obesitas di Indonesia, dapat diperlukan deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan deteksi obesitas di masyarakat, seperti melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dan Posyandu.

Kegiatan Posbindu merupakan kegiatan Bersama untuk menuju Perilaku Gaya Hidup Sehat serta implementasi perilaku "Cerdik". Cerdik ini mempunyai makna Cek Kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress.

Sejak tahun 2011, pemerintah telah merencanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) untuk membiasakan masyarakat menjalani gaya hidup sehat yang dimulai

dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat luas.

Meski penurunan berat badan pada penderita obesitas tidak mudah dilakukan, perubahan gaya hidup secara perlahan dapat membantu menurunkan berat badan sedikit demi sedikit serta mencegah dan memperbaiki masalah kesehatan yang berkaitan dengan obesitas.

Jika tidak ingin mengalami obesitas atau ingin menurunkan berat badan secara bertahap, masyarakat dianjurkan mulai menerapkan pola hidup sehat sejak sekarang. Salah satu langkah penting adalah memperhatikan jenis dan pola konsumsi makanan sehari-hari.

Selama ini masih banyak anggapan bahwa penderita obesitas atau orang yang berisiko obesitas harus sepenuhnya menghindari lemak. Padahal, tidak semua jenis lemak berbahaya bagi kesehatan. Yang perlu dilakukan adalah membatasi konsumsi lemak secara bijak dan seimbang.

Selain itu, konsumsi makanan tinggi gula serta makanan olahan perlu dikurangi karena dapat meningkatkan risiko obesitas. Makanan olahan yang mengandung lemak, garam, dan gula dalam jumlah tinggi cenderung mendorong seseorang untuk makan berlebihan.

Masyarakat juga disarankan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, yaitu sekitar lima hingga sembilan porsi per hari. Asupan sayur dan buah membantu menjaga keseimbangan kalori dalam tubuh, mencegah obesitas, serta menurunkan risiko konsumsi makanan secara berlebihan.

Menjaga berat badan ideal bukan lagi menjadi hal yang sulit dilakukan apabila dilakukan bersamaan dengan pola hidup sehat yang konsisten. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperbanyak konsumsi makanan berserat.

Makanan tinggi serat diketahui berperan penting dalam menjaga kestabilan berat badan. Bahkan, orang yang rutin mengonsumsi suplemen serat kompleks setiap hari selama 12 minggu dikabarkan mampu menurunkan berat badan hingga sekitar lima persen dari berat tubuh awal. Selain pola makan, aktivitas fisik juga menjadi faktor penting dalam menjaga dan menurunkan berat badan. Latihan aerobik dinilai efektif untuk membakar lemak serta meningkatkan kebugaran tubuh. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, masyarakat dianjurkan melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang

selama 150 menit per minggu atau aerobik berat selama 75 menit per minggu.

Tak hanya itu, latihan beban juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Latihan ini membantu menjaga massa otot dan meningkatkan metabolisme tubuh.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan latihan beban yang melibatkan otot-otot utama setidaknya dua kali dalam satu minggu, sebagai pelengkap aktivitas aerobik.

Di sisi lain, pengelolaan stres juga menjadi aspek penting yang sering diabaikan. Stres dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh dan pikiran, termasuk memicu perubahan pola makan.

Saat stres, respons otak dapat mendorong seseorang mengonsumsi makanan tinggi kalori secara berlebihan, yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko obesitas. Para ahli mengingatkan bahwa konsumsi makanan berkalori tinggi dalam jumlah berlebihan, jika dibarengi dengan minimnya aktivitas fisik dan tingkat stres yang tinggi, dapat mempercepat perkembangan obesitas.

Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara asupan makanan, aktivitas fisik, serta kesehatan mental menjadi kunci utama dalam mencegah dan mengatasi obesitas.

Dengan menerapkan pola makan tinggi serat, rutin berolahraga, melakukan latihan beban, serta mengelola stres dengan baik, masyarakat diharapkan mampu menjaga berat badan tetap ideal dan meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh. (Ella-UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini)



Roket Zhuque-3 Besutan LandSpace Tantang SpaceX

Untuk Cina menembus dominasi Amerika Serikat di sektor teknologi luar angkasa memasuki tahap baru. LandSpace, perusahaan rintisan antariksa yang berbasis di Beijing, tengah mempercepat pengembangan roket Zhuque-3, sistem peluncur orbit yang dirancang dapat digunakan kembali. Proyek ini secara terbuka diposisikan sebagai penantang Falcon 9 milik SpaceX.

Zhuque-3 dikembangkan dengan konsep pendaratan vertikal setelah misi peluncuran, pendekatan yang selama ini menjadi keunggulan utama SpaceX dalam menekan biaya operasi. LandSpace menilai efisiensi biaya sebagai faktor penentu dalam persaingan ekonomi luar angkasa, terutama di pasar peluncuran satelit komersial. Roket ini diperkirakan mampu mengangkut muatan hingga 18,3 ton ke orbit rendah Bumi.

Kemajuan teknis Zhuque-3 terlihat dari serangkaian pengujian di Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan, wilayah barat laut Cina. Pada awal 2024, LandSpace berhasil melakukan uji lepas landas dan pendaratan vertikal (vertical take-off and vertical landing/VTOL) dalam skala rendah. Tahapan berikutnya adalah uji statis yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2025, guna memverifikasi kinerja sembilan mesin TQ-12A yang menjadi sistem propulsi utama roket tersebut.

Berbeda dengan roket generasi lama yang mengandalkan bahan bakar berbasis kerosin, Zhuque-3 menggunakan kombinasi metana cair dan oksigen cair. Pilihan ini dinilai lebih bersih secara emisi, lebih stabil untuk pembakaran berulang, serta lebih sederhana dalam perawatan pascapenerbangan. Pendekatan

serupa juga digunakan SpaceX dan sejumlah pengembang roket generasi baru lainnya.

LandSpace mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah Cina yang kini lebih terbuka terhadap pendanaan swasta dan pasar modal di sektor teknologi strategis. Perusahaan ini mengakui terinspirasi oleh keberhasilan SpaceX, namun menekankan bahwa pengembangan Zhuque-3 merupakan hasil adaptasi dan inovasi mandiri.

Penggunaan material baja tahan karat dipilih untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan ketahanan struktur roket. Persaingan antariksa global saat ini bergeser dari

sekadar simbol kekuatan negara menuju kompetisi efisiensi teknologi dan model bisnis. Kehadiran Zhuque-3 menandai upaya Cina memperluas peran perusahaan swasta dalam industri peluncuran.

Jika seluruh tahapan uji berjalan sesuai rencana, Zhuque-3 berpotensi menjadi pemain penting dalam ekosistem peluncuran orbit rendah Bumi, berdampingan dengan Falcon 9 milik SpaceX.

Di tengah meningkatnya permintaan peluncuran satelit untuk kebutuhan komunikasi, pengamatan Bumi, hingga konstelasi internet global,

kemampuan roket yang dapat digunakan kembali menjadi faktor krusial dalam menekan biaya dan mempercepat frekuensi peluncuran. Kehadiran Zhuque-3 juga mencerminkan perubahan lanskap industri antariksa Cina, di mana peran perusahaan swasta semakin menonjol dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada badan antariksa negara.

Jika berhasil beroperasi secara komersial, roket ini berpotensi memperkuat posisi Cina dalam pasar peluncuran global sekaligus meningkatkan intensitas persaingan teknologi antariksa di tingkat internasional. (Nathasya-UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURACHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGALEK:** TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

Intip Ragam Pasmina yang Bakal Jadi Tren Hijab Lebaran 2026

Tren fesyen Lebaran 2026 tidak hanya berfokus pada busana rompi berpotongan longgar, tapi tren hijab juga turut menjadi pelengkap penting. Beragam model, motif, serta pilihan bahan menjadi faktor penentu. Salah satu yang diprediksi menjadi pilihan adalah hijab pasmina.

Pashmina viscose

Pashmina viscose merupakan jilbab panjang yang terbuat dari serat selulosa alami, seperti kayu atau bambu. Jenis hijab ini banyak diminati karena memiliki tekstur yang sangat lembut, ringan, sejuk saat digunakan, serta mudah menjuntai mengikuti bentuk wajah.

Selain itu, bahan viscose mampu menyerap keringat dengan baik sehingga memberikan kenyamanan optimal. Kilau alaminya turut menambah kesan elegan, menjadikan pashmina viscose pilihan yang sesuai untuk penggunaan sehari-hari, baik dalam gaya kasual maupun formal.

Material ini tergolong ringan, memiliki jatuh yang lembut (flowy), terasa sangat halus di kulit, sejuk saat dikenakan, serta mampu menyerap keringat dengan baik. Ketebalan bahannya relatif tipis, sehingga disarankan menggunakan ciput atau inner agar tampilan terlihat lebih rapi. Keunggulannya, nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan rasa gatal maupun iritasi. Tampilan terlihat lebih elegan



berkat kilau alaminya, serta mudah dipadukan dan dibentuk sesuai gaya yang diinginkan.

Disarankan mencuci secara manual dengan tangan menggunakan cara yang lembut. Hindari penggunaan mesin cuci untuk mencegah kerusakan pada bahan.

Cocok untuk berbagai gaya seperti lilit leher atau menjuntai syar'i. Harga pasaran berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000, tergantung merek dan kualitas. Pashmina viscose seringkali memiliki tekstur khas (*textured*) dan sangat cocok dipadukan dengan berbagai outfit karena fleksibilitas bahannya.

Pashmina cashmere

Pashmina cashmere merupakan selendang atau hijab berkelas yang dibuat dari serat bulu halus kambing Changra (kasmir). Jenis bahan ini dikenal memiliki tekstur yang sangat lembut, ringan, serta mampu memberikan kehangatan. Karena karakteristik tersebut, pashmina cashmere kerap dijadikan aksesori eksklusif yang menghadirkan kesan anggun dan elegan, baik untuk acara formal maupun kegiatan santai.

Bahan pashmina cashmere berasal dari lapisan bawah bulu kambing kasmir yang memiliki tingkat kehalusan tinggi. Teksturnya terasa lembut di kulit dan mampu memberikan kehangatan optimal tanpa menimbulkan rasa berat.

Dari sisi kualitas, serat kasmir terbaik umumnya memiliki ketebalan antara 12 hingga 16 mikron. Pashmina jenis ini banyak digunakan sebagai selendang, syal, maupun kerudung, dengan motif khas seperti gaya Turki, motif sulur, atau nuansa Arabian.

Dalam hal perawatan, pashmina cashmere memerlukan perlakuan khusus agar kualitas dan keawetannya tetap terjaga.

Di Indonesia, istilah "pashmina cashmere" tidak selalu merujuk pada bahan kasmir murni. Sebutan tersebut kerap digunakan untuk pashmina bermotif, seperti motif Turki atau hasil teknik cetak sublimasi, maupun pashmina berbahan premium seperti viscose atau modal yang lembut dan jatuh. Produk ini sering pula dikenal dengan sebutan Arabian atau Dubai shawl. Harga pashmina cashmere di pasaran pun beragam, mulai dari kategori terjangkau hingga kelas premium.

Pashmina voal

Bahan voal menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak perempuan karena sifatnya yang ringan dan lembut. Selain mudah dibentuk, pashmina voal juga memiliki kemampuan menyerap keringat dengan baik sehingga nyaman digunakan dalam berbagai kondisi cuaca.

Karakteristik tersebut menjadikannya cocok untuk tampilan hijab yang simpel dan rapi, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun acara formal. Selain pemilihan bahan, tren warna dan motif juga diprediksi menjadi penentu utama dalam gaya hijab Lebaran 2026. Palet warna lembut seperti sage green, ivory, beige, dusty pink, dan mocca diperkirakan tetap mendominasi karena mudah dipadukan dengan busana bernuansa netral.

maupun earth tone yang sedang digemari. Warna-warna tersebut memberi kesan bersih, tenang, dan elegan, selaras dengan suasana Hari Raya. Dari sisi motif, hijab polos masih menjadi favorit, namun aksen tekstur halus, motif minimalis, serta sentuhan bordir ringan mulai banyak diminati untuk memberikan kesan eksklusif tanpa terlihat berlebihan.

Untuk pashmina bermotif, desain geometris lembut, floral kecil, hingga nuansa etnik modern diprediksi akan tampil sebagai pilihan aman namun tetap stylish. Tren styling hijab Lebaran 2026 juga mengarah pada tampilan sederhana dan effortless. (Ella-UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini).



Pilihan Warna Aman untuk Padu Padan



Warna beige

Menjadi favorit karena bersifat netral dan mudah dipadukan dengan berbagai warna, baik cerah maupun gelap. Warna ini cocok untuk berbagai gaya dan suasana, serta memberi kesan lembut dan kalem.



Warna abu-abu

Juga fleksibel dipadukan dengan beragam busana. Hijab abu-abu mampu menyeimbangkan tampilan, terutama saat dipadukan dengan warna mencolok atau palet monokrom seperti hitam dan putih.



Warna krem

Menawarkan kesan bersih dan elegan, mirip broken white, serta cocok untuk outfit kasual. Namun, karena warnanya terang, hijab krem lebih mudah terlihat kotor sehingga perlu perhatian ekstra saat digunakan dan dirawat.

OTT Bertubi-tubi KPK ..dari hal 1

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua wilayah berbeda pada Rabu (4/2/2026). Operasi senyap tersebut dilakukan di Kalimantan Selatan dan Jakarta, menyasar aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto membenarkan adanya OTT di Kalimantan Selatan. Operasi itu, kata Fitroh, berkaitan dengan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. "Restitusi pajak. Ya (KPP Banjarmasin)," ujar Fitroh melalui pesan singkat. Namun, ia belum mengungkapkan lebih jauh konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik. "Masih pendalam," katanya.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang, salah satunya Mulyono Purwo Wijoyo, Kepala KPP Madya Banjarmasin. Dua orang lainnya masing-masing merupakan aparatur sipil negara dan pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, para pihak itu diduga terlibat dalam pengurusan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Tim mengamankan uang tunai sekitar Rp 1 miliar lebih," kata Budi.

Uang tersebut diduga terkait pengaturan proses restitusi PPN yang diajukan pihak swasta. Hingga kini, KPK masih mendalam alur pemberian dan penerimaan uang dalam perkara tersebut. Para pihak yang diamankan telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Di waktu hampir bersamaan, KPK juga menggelar OTT di Jakarta dan Lampung yang menjerat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu pihak yang diamankan adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai yang kini menjabat sebagai pejabat eselon II. Rizal ditangkap di wilayah Lampung, sementara pihak lain diamankan di Jakarta.

Operasi di Bea Cukai ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses importasi. Menurut Budi Prasetyo, penyidik menduga adanya praktik menyimpang dalam pengurusan kegiatan impor yang melibatkan pihak swasta dan pejabat Bea Cukai. "Konstruksi perkaranya berkaitan dengan kegiatan importasi," ujarnya.

Dari OTT di Bea Cukai, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, serta logam mulia sekitar 3 kilogram.

Sejumlah pihak telah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan menjalani pemeriksaan intensif, sementara lainnya masih dalam perjalanan ke Jakarta.

OTT di Jakarta dan Banjarmasin ini menjadi OTT kelima KPK sepanjang 2026, sekaligus menambah daftar panjang penindakan lembaga antirasuah terhadap sektor penerimaan negara. Hingga kini, KPK masih mendalam keterlibatan pihak lain dan belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kedua perkara tersebut.

KPK dalam keterangan sebelumnya mencatat bahwa KPK sudah melakukan empat OTT sebelum hari ini, yakni: OTT pertama menangkap delapan orang di Jakarta Utara pada 9-10 Januari; OTT kedua menangkap Wali Kota Madiun Madi bersama 14 orang; OTT ketiga menangkap Bupati Pati Sudewo terkait dugaan jual-beli jabatan perangkat desa; dan OTT keempat di lingkungan KPP Banjarmasin. Dengan dua OTT hari ini, total menjadi lima OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026. (wid,kum,ist,ant/dya)

Purbaya Tegaskan Tak akan Intervensi

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan intervensi politik ataupun meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya justru meminta proses hukum dilakukan secara tuntas dan terbuka, serta menjadikan OTT tersebut sebagai pintu masuk pembentahan menyeluruh di tubuh Kementerian Keuangan.

"Hari ini ada yang di-OTT di Banjarmasin dan di Jakarta. Ini mungkin menjadi shock therapy bagi pegawai kami," kata Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

OTT tersebut menyangkut pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto membenarkan adanya operasi penindakan tersebut. "Ya benar," ujar Fitroh singkat saat dikonfirmasi. Hingga Rabu malam, KPK masih mendalam perkara dan belum mengumumkan identitas resmi, konstruksi perkara, maupun rincian barang bukti yang diamankan.

Purbaya menilai, penindakan hukum oleh KPK harus dibaca sebagai peringatan keras bagi institusi yang selama ini memegang peran strategis dalam penerimaan negara. Menurut dia, kasus-kasus OTT di sektor pajak dan kepabeanan tidak boleh ditutup-tutupi, melainkan harus dijadikan momentum koreksi internal secara

besar-besaran.

"Ini justru titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus," ujarnya.

Dalam pernyataan yang tegas, Purbaya menyatakan tidak akan mengikuti praktik masa lalu dengan melibatkan kekuasaan politik untuk menghentikan perkara hukum anak buahnya. Ia menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan menghalangi kerja aparat penegak hukum dalam mengusut kasus tersebut.

"Saya tidak akan datang ke Presiden untuk minta KPK menghentikan kasus atau Kejaksaan menghentikan perkara seperti yang pernah terjadi di masa lalu," tegasnya.

Meski demikian, Purbaya menyatakan negara tetap berkewajiban memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terjerat kasus, sepanjang tidak mencampuri proses penegakan hukum. Pendampingan tersebut, menurut dia, dilakukan dalam koridor hak hukum sebagai warga negara, bukan untuk melemahkan proses penyidikan.

"Saya akan mendampingi mereka secara hukum, tapi proses hukum harus berjalan seadil-adilnya," kata Purbaya.

Ia juga menegaskan tidak akan ragu menonaktifkan pejabat yang terlibat, bahkan memberhentikan secara permanen jika terbukti bersalah melalui proses hukum. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga integritas institusi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Kita akan nonjob-kan. Mungkin ditaruh di pusat yang nggak ngap-ngapain. Kalau sudah terbukti salah, bisa diberhentikan," ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan

DERETAN OTT KPK DI 2026

Lanjutan dari hal 1...

OTT KPK PEGAWAI PAJAK SEBELUMNYA (JANUARI 2026)

Waktu:
Januari 2026

Lokasi:
Jakarta Utara

Instansi:
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pihak yang Diamankan dan Ditetapkan Tersangka:

- 5 orang tersangka, terdiri dari:
- 3 pegawai DJP (bertugas di KPP Madya Jakarta Utara)
- 1 konsultan pajak
- 1 wajib pajak

Modus Dugaan Korupsi:

- Penerimaan suap
- Imbalan untuk menurunkan atau mengurangi - ketetapan pajak wajib pajak

Status Hukum:

- Sudah ditetapkan tersangka oleh KPK
- Proses penyidikan berjalan

Signifikansi Kasus:

- Menjadi OTT pembuka KPK pada 2026
- Menandai kembali rawannya praktik korupsi di sektor perpajakan

REKAPITULASI OTT KPK DI LINGKUNGAN KEMENKEU TAHUN 2026 (HINGGA 4 FEBRUARI)

Total OTT:
3 OTT

Rinciannya:

- 2 OTT pegawai DJP
- 1 OTT pejabat DJBC

Pola Umum:

- Dugaan penyalahgunaan kewenangan
- Berkaitan dengan layanan strategis penerimaan negara

Berbagai sumber diolah

menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli menegaskan pihaknya bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK.

"DJP menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan," kata Rosmauli. Ia juga meminta publik menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait detail perkara.

Hal senada disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan adanya pemeriksaan KPK terhadap pejabat DJBC di Kantor Pusat Bea Cukai. Namun, ia belum merinci jumlah maupun jabatan pejabat yang diperiksa.

"Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat bea cukai," ujarnya. (wid,ist,kum/dya)

KORUPSI DANA HIBAH JATIM, KHOFIFAH DIJADWALKAN BERSAKSI DI PENGADILAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan kehadiran Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis (5/2/2026)

KPK mengatakan, kehadiran Khofifah sebagai saksi dibutuhkan untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan hibah di Pemprov Jatim.

Selain itu, Khofifah dipanggil karena nanya disebut dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU). Sehingga, majelis hakim kemudian meminta JPU untuk menghadirkan yang yang bersangkutan sebagai saksi dalam persidangan.

"Saksi dijadwalkan untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (5/2/2026)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Budi, keterangan



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan sesuai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Jawa Timur, Kamis (30/1/2026).ist

Khofifah dibutuhkan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait mekanisme

penganggaran, proses persetujuan, serta relasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyaluran dana hibah tersebut. Pemanggilan itu juga

REALISASI BELANJA HIBAH PROVINSI JATIM (2020-2023)

Dana Hibah Tahun 2020

RP 2.822.936.367.500

(18,2% dari APBD)

Dana Hibah Tahun 2021

RP 1.993.243.057.000

(11,6% dari APBD)

Dana Hibah Tahun 2022

RP 2.136.928.840.564

(11,7% dari APBD)

Dana Hibah Tahun 2023

Rp 1.416.612.250.000

(7,3% dari APBD)

Pengakuan Istri Siri Kusnadi Buka Skema Aliran Duit



Saksi Fujika Senna Oktavia istri siri Kusnadi Ketua DPRD Jatim saat diperiksa di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (30/1/2026). Is

FUJIIKA Senna Oktavia, istri siri almarhum mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, mengungkap peran dirinya dalam aliran dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jawa Timur. Pengakuan itu disampaikan Fujika saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat, 30 Januari 2026, dalam perkara korupsi hibah pokir DPRD Jawa Timur.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan secara rinci skema pengelolaan dana hibah pokmas yang disebut tidak hanya menjadi instrumen politik, tetapi juga sumber pembiayaan kepentingan pribadi. Salah satu pengakuan yang

mencuat adalah penerimaan sebuah mobil Mercedes-Benz senilai sekitar Rp 2,1 miliar oleh Fujika pada 2020, yang disebut sebagai hadiah ulang tahunnya ke-25.

Fujika menyatakan sumber dana pembelian mobil tersebut berasal dari dana pokok-pokok pikiran DPRD Jawa Timur yang dikelola Kusnadi ketika menjabat Ketua DPRD Jawa Timur.

Kesaksian ini kemudian menjadi pintu masuk bagi jaksa untuk mengurangi hubungan personal sekaligus politik antara Fujika dan Kusnadi.

Ia menjelaskan perkenalannya dengan Kusnadi bermula saat masih berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya dan menjabat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Kusnadi, yang kala itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, kerap membantu kegiatan kampus melalui berbagai proposal. Hubungan tersebut kemudian berlanjut dalam bentuk pendampingan kunjungan kerja tanpa status resmi sebagai staf.

Dalam sejumlah perjalanan dinas, Fujika mengaku mengurus keperluan teknis, termasuk menarik uang tunai menggunakan kartu ATM milik Kusnadi. Aktivitas tersebut berlangsung sebelum keduanya menikah siri pada 2019, bertepatan dengan persiapan Kusnadi dilantik sebagai Ketua DPRD Jawa Timur.

Jaksa KPK kemudian mengurai peran Fujika dalam pengurusan dana hibah pokmas. Ia mengakui menjadi perantara berbagai proposal hibah, meskipun tidak mengenal langsung para pengusul. Dana hibah, menurut kesaksianya, terlebih dahulu masuk ke rekening sebelum kemudian dibagikan.

Dalam proses itu, terdapat kewajiban setoran awal berupa ijon fee dengan besaran 15 hingga 20 persen dari nilai proposal. Dari pengakuan tersebut, jaksa menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk Jodi Pradana Putra, pihak swasta asal Blitar, yang disebut sebagai penyotor ijon fee terbesar.

Jodi disebut telah menyotorkan dana sebesar Rp 18,61 miliar kepada Kusnadi sepanjang periode 2018–2022. Dana tersebut berkaitan dengan pengelolaan hibah pokir senilai Rp 91,7 miliar. Penyerahan uang dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari hotel hingga melalui mesin ATM.(wid,dtc,sin/dya)

merupakan tindak lanjut dari permintaan majelis hakim setelah jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) di persidangan.

Selain Khofifah, KPK belum menjadwalkan pemanggilan saksi lain dari jajaran pimpinan Pemprov Jawa Timur. "Sejauh ini hanya Gubernur Jawa Timur yang dijadwalkan untuk menjadi saksi dalam persidangan besok," ujar Budi.

Ia menambahkan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak tidak masuk dalam daftar saksi yang dipanggil untuk sidang tersebut.

Pemanggilan Khofifah berlangsung di tengah pengembangan perkara korupsi dana hibah Jawa Timur yang berakar dari operasi tangkap tangan KPK pada Desember 2022. Operasi tersebut menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak, yang kemudian membuka rangkaian penyidikan lebih luas terkait praktik suap dalam penyaluran hibah pokok-pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur.

Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka. (wid,ist,kum/dya)